

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

**I Made Windra Wicaksana**

## **Abstrak**

Tindak pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat jarang diketahui oleh masyarakat, sehingga dilakukanlah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan meneliti apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, kemudian mencoba untuk menemukan solusi atas kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris normatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, buku, maupun dokumen resmi lainnya, serta bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Simpulan pada penelitian ini, penegakan hukum dalam proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku desersi dapat digambarkan secara global bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat ditegakan dan diketahui dalam penegakan hukum dalam proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana di pengadilan militer yang secara umum digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh anggota militer dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan penuntutan, kemudian persidangan dan terakhir adalah tahap eksekusi. Sedangkan hambatan atau kendala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengungkap fakta-fakta hukum untuk memutus secara *in absentia* dipengaruhi oleh faktor personal, faktor dalam peraturan, faktor procedural penyidikan, pemeriksaan, dan eksekusi di pengadilan.

Kata Kunci : Desersi, *In Absentia*, Putusan Pengadilan Militer.

# **LAW ENFORCEMENT OF DESERTION CRIMINAL ACTS BY INDONESIAN NATIONAL ARMY MEMBER IN MILITARY LAW COURT AREA II - 11 YOGYAKARTA**

**I Made Windra Wicaksana**

## ***Abstract***

*Crimes committed by the Indonesian National Army Forces (TNI) are very rarely known by the public, so this study aims was conducted to determine the settlement process of criminal acts of desertion committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and examine what are the obstacles in their implementation, then try to find solutions to these obstacles. This research was carried out by the method of normative empirical legal research. In this study also used a qualitative approach with primary legal material interviewing and secondary legal material in the form of legislation, books, and other official documents, as well as tertiary legal material in the form of a large Indonesian dictionary, encyclopedia and others. The conclusions in this study, law enforcement in the process and mechanism of settlement of crimes in Military Court II-11 Yogyakarta against deserters can be described globally that in accordance with Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts can be upheld and known in law enforcement in the process and the mechanism for the settlement of criminal acts in military courts which are generally used as guidelines for resolving desertion cases committed by members of the military starting from the stage of investigation, continuing prosecution, then trial and finally the execution stage. While the obstacles or constraints of Military Court II-11 Yogyakarta in revealing legal facts to decide in absentia are influenced by personal factors, factors in regulations, procedural factors of investigation, examination, and execution in court.*

*Keywords : Desertion, In Abtentia, Military Court Decision.*